



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 234 TAHUN 2019
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD DARI
DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN KARENA SUDAH
TIDAK DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang Pengelola Barang yang disebabkan karena sudah tidak digunakan serta sebagai tindaklanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, perlu ditetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Dari Daftar Barang Pengelola Barang Yang Disebabkan Karena Sudah Tidak Digunakan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN KARENA SUDAH TIDAK DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud dari Daftar Barang Pengelola Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud dari Daftar Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disebabkan karena barang milik daerah sudah tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas serta sebagai tindak lanjut atas Temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur .

Pasal 3

- (1) Memerintahkan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- (2) Pengelola Barang dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Walikota.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 234

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 234 TAHUN 2019
 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK
 BERWUJUD DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG
 DISEBABKAN KARENA SUDAH TIDAK DIGUNAKAN DALAM
 PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD
 KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019**

NO	KODE BARANG	NAMA APLIKASI	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	SKPD	ALASAN PENGHAPUSAN
1	07.21.01.01.01	Aplikasi Absensi Pegawai – Fingerprint	2010	49.750.000	Dinas Pendidikan	Sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan masa manfaatnya sudah habis.
2	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan	2010	198.380.000	Dinas Kesehatan	Sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, membutuhkan banyak perubahan parameter, baik Database, alur aplikasi & codingnya.
3	07.21.01.01.01	Aplikasi SIM JKN	2016	49.775.000	Dinas Kesehatan	Sistem Penatausahaan Dana Kapitasi (JKN) sudah terintegrasi dengan aplikasi SIMRAL Pemerintah Kota Probolinggo
4	07.21.01.01.01	Software dan upgrade design website SKPD pada DPU	2011	19.915.000	Dinas PU dan PR	Karena Ketinggalan Jaman dan tidak sesuai dengan kebutuhana SKPD yang makin berkembang
5	07.21.01.01.01	Aplikasi Data dan Informasi Jurnal dan Data Kontrak pada DPU	2013	19.950.000	Dinas PU dan PR	Karena Ketinggalan Jaman dan tidak sesuai dengan kebutuhana SKPD yang makin berkembang
6	07.21.01.01.01	Aplikasi Penunjang Data dan Pembayaran Rusunawa pada DPU	2013	19.980.000	Dinas PU dan PR	Karena Ketinggalan Jaman dan tidak sesuai dengan kebutuhana SKPD yang makin berkembang
7	07.21.01.01.01	Aplikasi Data dan Informasi Jasa Konstruksi pada DPU	2013	24.502.000	Dinas PU dan PR	Karena Ketinggalan Jaman dan tidak sesuai dengan kebutuhana SKPD yang makin berkembang
8	07.21.01.01.01	Aplikasi Monitoring dan Analisis Pekerjaan (MAP GPS Basis)	2014	49.720.000	Dinas PU dan PR	Karena Ketinggalan Jaman dan tidak sesuai dengan kebutuhana SKPD yang makin berkembang
9	07.21.01.01.01	Software dan upgrade design website SKPD pada BAPPEDA	2011	30.250.000	BAPPEDA & LITBANG	Karena tidak bisa di up grade
10	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Sistem Informasi Data Kepegawaian pada BAPPEDA	2011	39.900.000	BAPPEDA & LITBANG	Karena sudah ada aplikasi pengganti dari BKPSDM (SIMPEG)
11	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Penyusunan Kontrak Kinerja SKPD pada BAPPEDA	2011	49.373.500	BAPPEDA DAN LITBANG	Karena sudah ada aplikasi pengganti yang lebih terintergrasi yaitu simral
12	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2011	49.439.500	BAPPEDA DAN LITBANG	Karena sudah ada aplikasi pengganti yang lebih terintergrasi yaitu simral

13	07.21.01.01.01	Software Aplikasi KUA PPAS Tahun 2011	2011	39.600.000	BAPPED BAPPEDA & LITBANG A DAN LITBANG	Karena sudah ada aplikasi pengganti yang lebih terintegrasi yaitu simral
15	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Telecenter (Pembelajaran Masyarakat)	2011	5.000.000	BAPPEDA & LITBANG	Karena sudah menjadi urusan Diskominfo
16	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Sistem Informasi Musrenbang	2011	39.995.000	BAPPEDA & LITBANG	Karena sudah ada aplikasi pengganti yang lebih terintegrasi yaitu simral
17	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Sistem Informasi Surat Menyurat	2011	39.895.000	BAPPEDA & LITBANG	Karena sudah ada Aplikasi pengganti dari Dinas Perpustakaan dan Arsip
18	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Layanan Keluarga Miskin On Line (SILAGO)	2011	32.175.000	BAPPEDA & LITBANG	Karena sudah ada aplikasi pengganti yaitu aplikasi ULT-PK
19	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (SIM-PK)	2012	31.515.000	BAPPEDA & LITBANG	Karena sudah ada aplikasi pengganti yaitu aplikasi ULT-PK
20	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang (SITR)	2013	49.850.000	BAPPEDA & LITBANG	Karena sudah ada Aplikasi pengganti dari provinsi
21	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Penyusunan Database Bappeda	2013	39.998.750	BAPPEDA & LITBANG	Karena tidak suport dengan sistem operasi windows terbaru
22	07.21.01.01.01	Aplikasi Absensi Pegawai - Fingerprint	2010	49.750.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan masa manfaatnya sudah habis.
23	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Sistem Jaringan Data Informasi Hukum	2011	94.750.000,00	Bagian Hukum	karena server rusak
24	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Penatausahaan pada Bagian Hukum	2013	38.720.000,00	Bagian Hukum Setda	Untuk tahun pertama masih dipakai, tetapi karena ada program dari Diskominfo terkait dengan penatausahaan maka aplikasi ini tidak terpakai
25	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Lomba Kadarkum pada Bagian Hukum	2013	49.775.000,00	Bagian Hukum Setda	ditahun 2016 sudah tidak mengadakan lomba Kadarkum, materi yang ada di software sudah tidak sesuai dengan Juknis yang terbaru
26	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Sismatekum pada Bagian Hukum	2013	79.750.000,00	Bagian Hukum	karena aplikasi tersebut sdh terintegrasi dengan website propinsi
27	07.21.01.01.01	OS Windows Server, OLP R2 with user Call dan Media Kit Downgradeable	2014	15.000.000,00	Bagian Hukum	untuk memperbaharui Sistekum
28	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan	2011	49.850.000,00	BPPKAD	Telah Terakomodir dalam Aplikasi SIMRAL Kota Probolinggo
20	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Update Kartu Gaji/NPWP	2012	24.850.000,00	BPPKAD	Telah Terakomodir dalam SIM Gaji
30	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Gaji Daerah Otonom (GDO)	2012	24.850.000,00	BPPKAD	Telah Terakomodir dalam SIM Gaji

31	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Penunjang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	2012	7.000.000,00	BPPKAD	Telah Terakomodir dalam Aplikasi SIMRAL Kota Probolinggo
32	07.21.01.01.01	Software Audio Playlist	2013	6.787.000,00	BPPKAD	Tidak tersedianya lagi ruangan transit Walikota pada Gedung BPPKAD
33	07.21.01.01.01	Software Antivirus (Symantec Endpoint Protection Center Ver. Small Business Edition For Server)	2013	5.000.000,00	BPPKAD	Expired Lisensi
34	07.21.01.01.01	Windows Server 2012 Standart 64 Bit	2013	22.000.000,00	BPPKAD	PC Server Backup Rusak
35	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Backup Data (AI PBB Stream Backup)	2013	7.040.000,00	BPPKAD	PC Server Backup Rusak
36	07.21.01.01.01	Anti Virus Kaspersky	2016	12.490.500,00	BPPKAD	SKPD sudah tidak ada
37	07.21.01.01.01	Microsoft Windows Server Standart With Sa(P73-05758)	2016	22.000.000,00	BPPKAD	SKPD sudah tidak ada
38	07.21.01.01.01	Software dan upgrade design website SKPD	2011	34.800.000,00	BPPKAD	SKPD sudah tidak ada
39	07.21.01.01.01	Design Website SKPD pada PEMMAS	2013	29.600.000,00	BPPKAD	SKPD sudah tidak ada
40	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Data Anggota KORPRI	2013	34.980.000,00	BPPKAD	SKPD sudah tidak ada
41	07.21.01.01.01	Software	2017	40.000.000,00	Kecamatan Wonoasih	Karena terkait Program SIAKEL, Pelayanan Masyarakat cukup berhenti di Kelurahan
42	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan	2011	9.592.000,00	Dinas Perikanan	Karena Ketinggalan Jaman dan tidak sesuai dengan kebutuhan SKPD yang makin berkembang.
43	07.21.01.01.01	Software Antivirus Kaspersky	2011	9.800.000,00	Dinas Perikanan	Sudah Habis Masa Berlakunya
44	07.21.01.01.01	Software Antivirus Kaspersky	2012	4.500.000,00	Dinas Perikanan	Sudah Habis Masa Berlakunya
45	07.21.01.01.01	Software Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS)	2013	22.550.000,00	Dinas Perikanan	Karena Ketinggalan Jaman dan tidak sesuai dengan kebutuhan SKPD yang makin berkembang.
46	07.21.01.01.01	Software Audio Playlist pada DISKOMINFO	2013	6.000.000,00	Dinas Komunikasi & Informatika	Software audio Playlist pada Diskominfo tidak dipakai karena sudah ada System penjadwalan audio video
47	07.21.01.01.01	Softwere dan upgrade design website SKPD	2012	19.882.500,00	Dinas Penanaman Modal da PTSP	Dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dan alamat website
48	07.21.01.01.01	e-Perijinan	2013	49.995.000,00	Dinas Penanaman Modal da PTSP	Karena Permintaan dan Kebutuhan Penyiapan Data sehingga aplikasi perlu di upgrade

49	07.21.01.01.01	e-Perijinan (Upgrade)	2014	49.940.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Karena Aplikasi Out Off Date, Karena kebutuhan penyiapan data dan Pada Tahun 2012-2015 Aplikasi ini masih digunakan karena adanya kebijakan aplikasi baru dari Kementerian KOMINFO yang bernama SICANTIK yang diwajibkan kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota sehingga aplikasi e-perizinan tidak dipakai
50	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Statistik (SPSS)	2011	250.000,00	Bagian Umum Setda	Aplikasi ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada sekarang atau tidak ter update
51	07.21.01.01.01	Software Apikasi Sistem Informasi Surat Menyurat	2012	49.995.000,00	Bagian Umum Setda	Aplikasi ini masih kurang sempurna atau belum sesuai sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Bagian Umum Setda Kota Probolinggo
52	07.21.01.01.01	Software dan upgrade design website SKPD	2011	99.707.500,00	Dinas Tenaga Kerja	Aplikasi /Software telah kadaluarsa sehingga tidak bisa dipakai
53	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	2010	28.210.810,00	Dinas Kependudukan dan Capil	Sudah menggunakan Aplikasi yang sudah di upgrade
54	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	2011	34.750.000,00	Dinas Kependudukan dan Capil	Sudah menggunakan Aplikasi yang sudah di upgrade
55	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	2012	19.675.000,00	Dinas Kependudukan dan Capil	Sudah menggunakan Aplikasi SIAK terbaru dari Pusat
56	07.21.01.01.01	Software Anti Virus Kaspersky	2012	25.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Capil	Masa Aktif Lisensi hanya 1 tahun dan tidak digunakan lagi
57	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	2011	49.500.000,00	Bagian Pembangunan Setda	Karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan SKPD
58	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	2012	39.950.000,00	Bagian Pembangunan Setda	Karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan SKPD
59	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelurahan (SIMKEL) pada BAGIAN PEMERINTAHAN	2013	151.844.000,00	Bagian Pemeritahan Setda	Aplikasi ini mempunyai database kependudukan yang tidak terupdate sesuai dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Capil, sehingga tidak dapat menjadi acuan pelayanan di masing-masing Kelurahan.
60	07.21.01.01.01	Software Aplikasi Pelayanan Publik dalam Bidang Perpustakaan	2011	14.900.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Karena Ketinggalan Jaman dan tidak sesuai dengan kebutuhan SKPD yang makin berkembang./rusak/ atau masa kegunaannya telah berakhir

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN